

PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

Herwan Nafil, S.T., M.M.

Manajemen Informatika, Politeknik Unggul LP3M
Jl. Iskandar Muda No. 3-CDEF Medan, Sumatera Utara
E-mail : herwannafil22@gmail.com

Abstrak

Penulisan tesis ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Data yang digunakan adalah data sekunder dari Perda Perubahan APBD Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2013. Pengolahan datanya menggunakan analisis regresi linear sederhana dan analisis regresi linear berganda. Dari hasil penelitian dapat dibuktikan bahwa jika bersama-sama maka DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Tetapi jika secara parsial, maka DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, sedangkan PAD berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Daerah. Koefisien determinannya (R^2) adalah sebesar 0,971, ini menunjukkan bahwa Belanja Daerah dipengaruhi oleh DAU dan PAD sebesar 97,1 %, sisanya 2,9 % dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini.

Kata Kunci : Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Daerah.

I. PENDAHULUAN

Pada pemerintahan kabupaten, Belanja Daerah mempunyai arti penting dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. Belanja Daerah harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan/pendapatan dalam jumlah yang cukup dan juga harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya. Sementara itu Pendapatan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan yang didasarkan ketentuan perundang-undangan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempunyai beberapa fungsi diantaranya adalah fungsi Alokasi, Distribusi dan Stabilisasi. Fungsi Alokasi bertujuan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta

meningkatkan efisiensi & efektivitas perekonomian. Fungsi Distribusi bertujuan untuk memperhatikan keadilan. Sedangkan fungsi Stabilisasi bertujuan menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Dalam struktur APBD yang mengacu pada UU Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Daerah terdiri dari 3 sumber yaitu : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. PAD terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan), Transfer Pemerintah Pusat Lainnya (Dana Penyesuaian) dan Transfer Pemerintah Provinsi. Sedangkan Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri atas

Pendapatan Hibah dan Pendapatan Dana Darurat. Dana Perimbangan terdiri lagi atas Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Untuk daerah yang mempunyai PAD cukup besar dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan Belanja Daerahnya, dimungkinkan tidak mendapat jatah DAU dari pemerintah pusat. Sehingga dapat juga diartikan semakin besar PAD suatu daerah, maka akan semakin kecil DAU yang akan didapatnya, karena berarti daerah tersebut sudah semakin mampu untuk membiayai dirinya sendiri.

Berjalan dengan terus disempurnakannya otonomi daerah, maka setelah diberlakukannya UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sejak 1 Januari 2011, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang satu diantaranya adalah Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dialihkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten/Kota, berdampak pada meningkatnya PAD secara signifikan. Dari Laporan Keuangan (setelah diperiksa/audited) Tahun Anggaran 2011 Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, tercatat PAD tahun 2011 naik sebesar 77,37 %.

Faktor lain yang umumnya merupakan bagian penting dan mempunyai porsi cukup besar dalam pendapatan daerah adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Dalam rangka Pemerintah Daerah membiayai operasional/belanja daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber pendanaan utama. DAU bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah pusat dengan daerah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum. Dalam Laporan Keuangan (audited) Tahun Anggaran 2011 Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, terdapat kenaikan DAU sebesar 12,03 %.

Dikarenakan DAU merupakan komponen terbesar pembentuk anggaran

pemerintah daerah, dan juga dengan diterbitkannya UU baru tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU 28 thn 2009) yang berdampak pada kenaikan PAD secara signifikan, maka menjadi sangatlah penting untuk diketahui bagaimana dampak dari kedua hal tersebut terhadap alokasi belanja pemerintah daerah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Dengan demikian, anggaran mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan memberi landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah untuk suatu periode tertentu yang biasanya mencakup periode tahunan. Dengan demikian, fungsi anggaran di lingkungan pemerintah mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, antara lain karena anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan.

APBD terdiri dari:

- a. Anggaran pendapatan, terdiri atas :
 - 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan Penerimaan Lain-lain.

- 2) Bagian Dana Perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
- 3) Lain-lain Pendapatan yang Sah seperti Dana Hibah atau Dana Darurat.
 - b. Anggaran belanja, yaitu yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.
 - c. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Struktur APBD dapat diringkas sebagai berikut :

a. PENDAPATAN		Rp.
b. BELANJA		Rp.
Belanja Tidak Langsung		
Belanja Langsung		
		----- (-)
Surplus/(Defisit)	=	Rp.
c. PEMBIAYAAN		Rp.
Penerimaan Pembiayaan		
Pengeluaran Pembiayaan		
Pembiayaan Netto		Rp.
		----- (-)
SILPA Tahun Berjalan		Rp.

B. Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. “Bahkan, Belanja Daerah menjadi instrumen penting dalam menstimulus perekonomian daerah”. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari

rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran.

Belanja Daerah dapat dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Sebagaimana telah dibatasi pada bagian di atas (batasan masalah), maka Belanja Daerah menurut kelompok belanja dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok Belanja Tidak Langsung dibagi menurut jenis belanja terdiri dari 8 (delapan) yaitu:

1. Belanja Pegawai;
2. Bunga;
3. Subsidi;
4. Hibah;
5. Bantuan Sosial;
6. Belanja Bagi Hasil;
7. Bantuan Keuangan; dan
8. Belanja Tidak Terduga.

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok Belanja Langsung dibagi menurut jenis belanja terdiri dari 3 (tiga) yaitu:

1. Belanja Pegawai;
2. Belanja Barang dan Jasa; dan
3. Belanja Modal.

C. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersifat “*Block Grant*” yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dasar hukum DAU adalah UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah; dan PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

DAU dialokasikan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota. Besarannya ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) netto yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU untuk daerah Provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbalan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.

DAU merupakan salah satu komponen dari Dana Perimbangan APBN, yang pengalokasiannya didasarkan atas Formula dengan konsep Kesenjangan Fiskal atau Celah Fiskal (*Fiscal Gap*), yaitu selisih antara Kebutuhan Fiskal dengan Kapasitas Fiskal. DAU juga merupakan sebagai equalization grant, yaitu berfungsi untuk menetralisasi ketimpangan kemampuan keuangan dengan adanya PAD, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil SDA yang diperoleh Daerah.

DAU = Alokasi Dasar (AD) + Celah Fiskal (CF)

Dimana :

AD = Gaji PNS Daerah

CF = Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal

Komponen variable Kebutuhan Fiskal (*Fiscal Needs*) yang digunakan untuk pendekatan perhitungan terdiri dari: jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Komponen variable Kapasitas Fiskal (*Fiscal Capacity*) merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil (DBH).

D. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Penerimaan Pajak yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penerimaan Non Pajak yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah, Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Identifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal.

Kendala utama yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah minimnya pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Proporsi Pendapatan Asli Daerah yang rendah, di lain pihak menyebabkan Pemerintah Daerah memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelola keuangan daerah. “Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD)”. Sebagian besar pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, dibiayai dari dana perimbangan, terutama Dana Alokasi Umum.

Berdasarkan UU 28 tahun 2009 Bab II Pasal 2 ayat (2), daerah kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk memungut 11 (sebelas) jenis pajak yaitu :

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Selain memungut pajak-pajak di atas, pemerintah kabupaten juga dapat memungut 3 jenis Retribusi, yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum;

2. Retribusi Jasa Usaha; dan
3. Retribusi Perizinan Tertentu.

Selanjutnya dalam Bab VI Pasal 110 ayat (2), daerah kabupaten/kota dapat memungut 14 (empat belas) jenis Retribusi Jasa Umum yaitu :

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
6. Retribusi Pelayanan Pasar;
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
10. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
13. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Sementara masih dalam bab yang sama, pada Pasal 127, daerah kabupaten/kota dapat memanfaatkan/mengoptimalkan 11 (sebelas) jenis Retribusi Jasa Usaha yaitu :

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
3. Retribusi Tempat Pelelangan;
4. Retribusi Terminal;
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
7. Retribusi Rumah Potong Hewan;
8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
10. Retribusi Penyeberangan di Air; dan

11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Sedangkan dalam Bagian Keempat Pasal 141 UU 28 tahun 2009, Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Ada 5 (lima) jenis Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu:

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
3. Retribusi Izin Gangguan;
4. Retribusi Izin Trayek; dan
5. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif lebih pada upaya/tujuan untuk generalisasi, karena diperkirakan data yang ada beraturan sehingga mudah untuk digeneralisasi. Untuk analisisnya adalah menggunakan analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi linier berganda.

A. Definisi Operasional

Variabel independen dalam penelitian ini adalah X_1 sebagai Dana Alokasi Umum (DAU) dan X_2 sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan variabel dependennya adalah Y sebagai Belanja Daerah (BD). Variabel Y terdiri atas 2 kelompok yaitu Y_1 sebagai Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Y_2 sebagai Belanja Langsung (BL).

1. Variabel Independen

a. Dana Alokasi Umum (X_1)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana Pemerintah Pusat kepada Pemerintah

Daerah yang bersumber dari APBN, yang jumlah besarnya ditentukan langsung oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan. Skala pengukurannya adalah skala rasio.

b. Pendapatan Asli Daerah (X₂)

Sebagaimana telah dijelaskan dalam landasan teori, Pendapatan Asli Daerah (PAD) = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah + Penerimaan Lain-lain. Skala pengukurannya adalah skala rasio.

2. Variabel Dependen Belanja Daerah (Y)

Belanja daerah merupakan jumlah realisasi belanja tidak langsung (Y₁) ditambah belanja langsung (Y₂). Skala pengukurannya adalah skala rasio.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Objek penelitian dalam penulisan ini adalah Kantor Pemerintah Kabupaten Deli Serdang di Jl Negara No: 3 Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

2. Waktu/Periode Penelitian

Periode data yang digunakan adalah Perda Perubahan APBD dan Perbup Penjabaran Perubahan APBD mulai Tahun Anggaran 2004 sampai dengan Tahun Anggaran 2013 Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang terdiri dari 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan pemerintahan daerah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpul dengan cara studi kepustakaan / studi dokumen. Data langsung diambil dari *hard copy* Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perda PAPBD) yang telah disyahkan ataupun dari *soft copy* laporan yang ada.

Metode pengambilan data sekunder yang dikumpulkan dengan metode dokumentasi ini, dilakukan dengan mencatat/memasukkan dalam komputer dan menghitung data-data yang berhubungan dengan penelitian ini selama 10 tahun (2004 s.d 2013) dari seluruh SKPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

E. Teknik Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Penyajian statistik deskriptif bertujuan agar dari data yang ada dapat diketahui profil variable-variabel yang ada seperti rata-ratanya, standar deviasinya, dan lain-lainnya. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dana Alokasi Umum (X₁), Pendapatan Asli Daerah (X₂), Belanja Daerah (Y), Belanja Tidak Langsung (Y₁) dan Belanja Langsung (Y₂).

2. Pengujian Asumsi Klasik

a. Normalitas Data

Uji ini akan menguji data variabel independen (X) dan data variabel dependen (Y) pada regresi yang dihasilkan, apakah berdistribusi normal atau tidak normal. Persamaan regresi bisa digolongkan baik jika data variabel independen dan dependen distribusinya mendekati normal ataupun normal.

Satu diantara cara untuk menguji normalitas data dapat digunakan cara statistik. Dalam mengujinya adalah dengan melihat nilai kemiringan kurva (skewness = a₃) atau nilai keruncingan kurva (kurtosis = a₄) diperbandingkan dengan nilai Z tabel.

$$Z_{\text{skewness}} = \text{Skewness} / \sqrt{(6/N)}$$
$$\text{atau } Z_{a_3} = a_3 / \sqrt{(6/N)}$$

$$Z_{\text{kurtosis}} = \text{Kurtosis} / \sqrt{(24/N)}$$
$$\text{atau } Z_{a_4} = a_4 / \sqrt{(24/N)}$$

Dimana : N = banyaknya data.

Variabel berdistribusi normal jika Z_{hitung} (dalam hal ini Z_{a_3} dan Z_{a_4}) $< Z_{\text{tabel}}$, dan sebaliknya dikatakan berdistribusi tidak normal jika $Z_{\text{hitung}} > Z_{\text{tabel}}$.

b. Pengujian Multikolinieritas.

Pengujian ini digunakan untuk analisis regresi berganda yang terdiri atas dua atau lebih variabel independen,

yang akan mengukur keeratan (asosiasi) hubungan antar variabel independen tersebut. Dikatakan terjadi multikolinearitas jika koefisien korelasi antara variabel independen (X_1, X_2, \dots dst) lebih besar dari 0,60. Model regresi yang baik adalah tidak terdapat korelasi diantara variabel independennya.

Menentukan ada tidaknya multikolinearitas, dapat dilakukan juga dengan cara mencari *tolerance value* (a), yaitu besarnya tingkat kesalahan yang dibenarkan secara statistik, dan mencari *variance inflation factor* (VIF) yaitu faktor penyimpangan baku kuadrat.

Besar *tolerance value* (a) = $1 / VIF$

Besar *variance inflation factor* (VIF) = $1 / a$

Variabel independen mengalami multikolinearitas jika $a_{hitung} < a$ dan $VIF_{hitung} > VIF$, dan sebaliknya jika $a_{hitung} > a$ dan $VIF_{hitung} < VIF$ maka variabel independen tidak mengalami multikolinearitas.

c. Pengujian Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan menguji apakah residual dari observasi yang satu dengan observasi lainnya mempunyai varians yang sama atau berbeda. Jika variansnya sama disebut terjadi homoskedastisitas, dan jika variansnya berbeda disebut terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah jika tidak terjadi heteroskedastisitas.

Pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat dari output SPSS melalui grafik scatterplot antar $Z_{prediction}$ (ZPRED) yang merupakan variabel independen dan nilai residualnya (SRESID) yang merupakan variabel dependen. Jika pada *scatterplot* titi-titik menyebar di bawah ataupun di atas titik origin (titik nol) pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang teratur maka terjadi homoskedastisitas. Tetapi jika pada *scatterplot* titiknya mempunyai pola yang teratur, baik menyempit, melebar atau bergelombang, maka yang terjadi adalah heteroskedastisitas.

d. Pengujian Autokorelasi

Model regresi yang baik adalah yang tidak mempunyai masalah

autokorelasi. Satu diantara cara menguji ada tidaknya autokorelasi adalah dengan uji Durbin – Watson (DW). Jika nilai DW terdapat pada -2 sampai +2 ($-2 \leq DW \leq 2$), maka tidak terjadi autokorelasi.

3. Analisis Regresi Linear

Analisis regresi adalah suatu analisis yang mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi ada dua jenis yaitu analisis regresi sederhana yang menganalisis satu variabel independen terhadap satu variabel dependen dan analisis regresi linier berganda yaitu menganalisis beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen.

Dari beberapa hipotesa yang telah diuraikan di atas, maka model persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear sederhana dan regresi linear berganda, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. $Y_1 = a + b_1.X_1 + e$
2. $Y_2 = a + b_2.X_2 + e$
3. $Y = a + b_1.X_1 + b_2.X_2 + e$

Dimana :

Y = Variabel dependen (Belanja Daerah)

Y_1 = Variabel dependen 1 (Belanja Tidak Langsung)

Y_2 = Variabel dependen 2 (Belanja Langsung)

X_1 = Variabel independen 1 (Dana Alokasi Umum)

X_2 = Variabel independen 2 (Pendapatan Asli Daerah)

a = konstanta; e = faktor-faktor lainnya

b = koefisien regresi untuk variabel X

$$b = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{n \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

Pengujian regresi dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat pengujian asumsi klasik yaitu harus dipenuhi data terdistribusikan secara normal, tidak terjadi autokorelasi, tidak mengandung multikoloniaritas dan heterokedastisitas.

4. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis merupakan suatu anggapan yang mungkin benar

yang sering digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan atau solusi atas persoalan yang ada. Untuk mengetahui hipotesis diterima atau ditolak, perlu dilakukan pengujian terhadap variabel-variabel yang ada (X_1 dan X_2) baik secara parsial ataupun secara bersama-sama/simultan. Perhitungan statistik disebut signifikan apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (H_0 ditolak), dan tidak signifikan apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah H_0 diterima.

a. Uji signifikansi parameter individual (uji Statistik t)

Uji t ini digunakan untuk membuktikan apakah variabel independen secara individu mempengaruhi variabel dependen. Tujuan dari uji t adalah untuk menguji koefisien regresi secara individual. Ada 2 kemungkinan Hipotesa yaitu :

- Hipotesa Nol = H_0
 H_0 adalah satu pernyataan mengenai nilai parameter sampel. H_0 merupakan hipotesis statistik yang akan diuji hipotesis nihil.

- Hipotesa alternatif = H_a
 H_a adalah satu pernyataan yang diterima jika data sampel memberikan cukup bukti bahwa hipotesa nol adalah salah/ditolak.

Langkah-langkah/urutan menguji hipotesa dengan distribusi t adalah:

1. Merumuskan hipotesa
 $H_0 : \beta_i = 0$, artinya variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.
 $H_a : \beta_i \neq 0$, artinya variabel independen merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

2. Menentukan taraf nyata/ *level of significance* = α

Taraf nyata / derajat keyakinan yang digunakan sebesar $\alpha = 1\%, 5\%, 10\%$, dengan:

$$df = n - k$$

Dimana:

$df = \text{degree of freedom/}$ derajat kebebasan

$n =$ Jumlah sampel

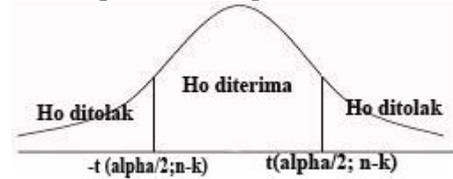
$k =$ banyaknya koefisien regresi + konstanta.

3. Menentukan daerah keputusan, yaitu daerah dimana hipotesa nol diterima atau tidak.

Untuk mengetahui kebenaran hipotesis digunakan kriteria :

H_0 diterima apabila $-t_{(\alpha/2; n-k)} \leq t_{hitung} \leq t_{(\alpha/2; n-k)}$, artinya tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

H_0 ditolak apabila $t_{hitung} > t_{(\alpha/2; n-k)}$ atau $-t_{hitung} < -t_{(\alpha/2; n-k)}$, artinya ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.



4. Menentukan uji statistik (*rule of the test*)

5. Mengambil keputusan
Keputusan bisa menolak H_0 atau menerima H_0 .

Nilai t_{tabel} yang diperoleh, dibandingkan nilai t_{hitung} , bila t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} , maka H_0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independent berpengaruh pada variabel dependent.

Apabila t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} , maka H_0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

b. Uji signifikansi simultan (uji Statistik F)

Uji statistik F berguna untuk menguji hipotesis mengenai suatu parameter dari beberapa variabel independen apakah mempunyai pengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Tabel F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Langkah-langkah/urutan menguji hipotesa dengan distribusi F

1. Merumuskan hipotesa

Ho : $\beta_1 = \beta_2 = 0$, berarti secara bersama-sama tidak ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
 Ha : $\beta_1 \neq \beta_2 \neq 0$, berarti secara bersama-sama ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

2. Menentukan taraf nyata / *level of significance* = α

Taraf nyata / derajat keyakinan yang digunakan sebesar $\alpha = 1\%, 5\%, 10\%$.
 Derajat kebebasan (df) dalam distribusi F ada dua, yaitu :

$$df \text{ numerator} = df_n = df_1 = k - 1$$

$$df \text{ denominator} = df_d = df_2 = n - k$$

Dimana:

df = *degree of freedom*/ derajat kebebasan

n = Jumlah sampel

k = banyaknya koefisien regresi

3. Menentukan daerah keputusan, yaitu daerah dimana hipotesa nol diterima atau tidak

Ho diterima apabila $F_{hitung} \leq F_{tabel}$, artinya semua variabel independen secara bersama-sama bukan merupakan variabel penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

Ho ditolak apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$, artinya semua variabel independen secara bersama-sama merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

4. Menentukan uji statistik nilai F

Bentuk distribusi F selalu bernilai positif, sebagaimana berikut ini :



5. Mengambil keputusan

Keputusan bisa menolak Ho atau menerima Ho.

Nilai F_{tabel} yang diperoleh dibanding dengan nilai F_{hitung} apabila F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} , maka Ho ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

5. Pengujian Perbandingan 2 Rata-rata

Pengujian ini biasa dilakukan pada subyek sebelum dan sesudah suatu

proses, yang digunakan pada sampel berpasangan. Dalam data pada penelitian ini, yang diambil adalah data berpasangan pada seluruh organisasi yang ada pada pemerintah kabupaten Deli Serdang (sebanyak 34 organisasi/dinas) pada tahun sebelum diberlakukannya UU No 28 Tahun 2009 (tahun 2010) dan tahun setelah diberlakukannya UU No 28 Tahun 2009 (tahun 2011).

Seperti pengujian-pengujian sebelumnya, pengujian ini juga akan dibantu dengan software SPSS (menggunakan Paired Samples T Test). Dari output data nantinya akan dibandingkan nilai t_{hitung} yang didapat dengan nilai t_{tabel} . Jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka Ho diterima yang berarti tidak ada perbedaan signifikan antara sebelum dan setelahnya, tetapi jika $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka Ho ditolak yang berarti ada perbedaan signifikan antara sebelum dan setelahnya.

6. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi sederhana (r^2) dan koefisien determinasi berganda (R^2_{y12}) berfungsi untuk mengukur besarnya kontribusi X terhadap variasi Y dan kontribusi X_1 & X_2 terhadap variasi Y. r^2 dan R^2_{y12} masing-masing juga digunakan untuk menentukan apakah suatu garis linear sederhana ataupun berganda sudah cocok digunakan sebagai pendekatan atas suatu hubungan linear antar variable.

Besar nilai koefisien determinasi adalah antara 0 sampai 1. Apabila nilai koefisien determinasi mendekati / sama dengan 1, maka pendekatannya hampir/betul-betul sempurna. Persamaan garis regresi selalu disertai nilai r^2 dan R^2_{y12} sebagai ukuran kecocokan (*goodness of fit*).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Setelah diolahnya data yang telah dikumpulkan dari 34 Organisasi pada Perda Perubahan APBD dan Perbup Penjabaran Perubahan APBD Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, maka total masing-masing variabel

adalah seperti terlihat dalam Tabel IV.1b.

Tabel IV.1b : Data dari variabel Independen X dan Dependen Y (dalam Rp)

Tahun	DAU (X ₁)	PAD (X ₂)	Belanja Daerah (Y)	
			Belanja Tdk Lngsg (Y ₁)	Belanja Langsung (Y ₂)
2004	485.416.000.000	50.509.513.589	533.990.743.240	80.914.956.776
2005	330.429.000.000	59.145.801.000	417.773.550.537	104.571.465.516
2006	637.495.000.000	69.246.725.000	502.007.945.240	360.118.773.529
2007	708.480.000.000	82.828.517.800	552.130.297.436	517.710.953.321
2008	779.762.110.000	86.799.499.908	670.262.499.507	508.771.463.111
2009	784.029.240.000	102.907.208.100	783.006.512.674	537.306.818.928
2010	793.141.685.000	134.281.363.989	894.553.972.976	515.280.135.824
2011	888.557.680.000	241.225.296.440	1.023.870.254.088	762.577.921.525
2012	1.100.013.616.000	390.027.110.293	996.070.906.671	1.028.034.033.947
2013	1.260.755.135.000	465.000.000.000	1.121.494.372.730	1.261.699.749.060

Sumber: Perda Perubahan APBD Kabupaten Deli Serdang tahun 2004 s.d 2013

Dalam tabel IV.1b di atas terlihat data variabel Independen yaitu DAU (X₁), PAD (X₂) dan variabel dependen yaitu Belanja Tidak Langsung (Y₁) dan Belanja Langsung (Y₂). Data dalam tabel inilah yang akan menjadi sumber/dasar beberapa uji pada bagian-bagian pengolahan data berikutnya. Pada tabel IV.1b tersebut, mulai tahun 2011 (sejak diberlakukannya UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) PAD meningkat cukup signifikan dari sebelumnya Rp 134.282.363.989,- menjadi Rp 241.225.296.440,- (naik 79,64 %). Selanjutnya pada tahun 2012, Belanja Langsung yang biasanya dari tahun ke tahun (2004 – 2011) selalu besarnya dibawah Belanja Tidak Langsung, jumlahnya melampaui Belanja Tidak Langsung. Ini tentunya tidak terlepas dari akibat pendaerahan pajak pusat tersebut dan juga pengelolaan daerah yang terus membaik setelah 2 tahun berjalan.

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas Data

Satu diantara uji normalitas adalah dengan cara statistik. Dalam pengujian variabel dependen dan independen pada cara ini adalah melalui nilai kemiringan kurva (skewness = a3) atau nilai keruncingan kurva (kurtois = a4) diperbandingkan dengan nilai Z_{tabel}.

Tabel IV.2a : Hasil Perhitungan Z_{skewness} dan Z_{kurtois}

DAU		
N	Valid	10
	Missing	0
Skewness		.223
Std. Error of Skewness		.687
Kurtosis		.260
Std. Error of Kurtosis		1.334

Berdasarkan hasil output pengolahan data melalui alat bantu software SPSS (seperti terlihat pada tabel IV.2a), didapat nilai Z_{skewness} = 0,223 dan nilai Z_{kurtois} = 0,26. Sementara untuk nilai Z_{tabel}, jika Z 5%, maka dari Tabel Kurva Normal pada lampiran didapat Z_{tabel} = 1,96.

Dikarenakan Z_{hitung} (yaitu nilai Z_{skewness} atau nilai Z_{kurtois}) < Z_{tabel} (0,223 atau 0,26 < 1,96), maka dapat disimpulkan bahwa data yang ada adalah berdistribusi normal sehingga baik digunakan dalam penelitian ini.

b. Uji Multikolinearitas

Berdasarkan dari hasil output pengolahan data regresi linear berganda DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah (BD), pada bagian Coefficient (Tabel IV.2b), VIF = 5.257 < 10, atau toleransi = 0.190 > 0.1, maka berarti tidak terjadi multikonearitas.

Tabel IV.2b : Output Coefficients Regresi Linear Berganda DAU, PAD dan BD

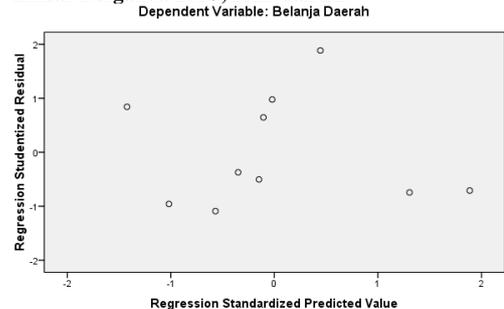
Coefficients ^a									
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta				Tolerance	VIF
1	(Constant)	-1.303E11	1.742E11			-.748	.478		
	DAU	1.616	.328	.725	4.913	.002	.190	5.257	
	PAD	1.145	.601	.281	1.904	.089	.190	5.257	

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

c. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil output pengolahan data regresi linear berganda pada Tabel IV.2c, terlihat pada Chart titik-titiknya tidak membentuk pola tertentu/teratur (seperti bergelombang, melebar kemudian menyempit), tetapi titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

Tabel IV.2c : Output Residuals Statistics Regresi Linear Berganda DAU, PAD dan BD



d. Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil output pengolahan data regresi linear berganda pada Tabel IV.2d, terlihat nilai Durbin Watson (DW) = 1.648, yang berada antara - 2 dan + 2 ($- 2 \leq DW \leq 2$), maka berarti tidak terjadi autokorelasi.

Tabel IV.2d : Output Model Summary Regresi Linear Berganda DAU, PAD dan BD

Model Summary ^a					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.985 ^a	.971	.963	1.165E11	1.648

a. Predictors: (Constant), PAD, DAU
 b. Dependent Variable: Belanja Daerah

2. Analisis Regresi Linear

a. Analisis Regresi Linear Sederhana X_1 (DAU) dan Y_1 (BTL)

(Persamaan : $Y_1 = a + b \cdot X_1 + c$)

Berdasarkan pengolahan data melalui alat bantu software SPSS dengan input variabel independen (X_1) yaitu Dana Alokasi Umum dan variabel dependen (Y_1) yaitu Belanja Tidak Langsung, maka didapat hasil/output sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel IV.3 berikut ini:

Tabel IV.3 : Output Regresi Linear DAU dan Belanja Tdk Langsung

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.000E11	1.117E11		.695	.397
	DAU	.836	.137	.908	6.123	.000

a. Dependent Variable: Belanja Tdk Langsung

Nilai R dalam tabel dapat dilihat pada kolom Beta yaitu sebesar 0,908, artinya korelasi antara DAU dan BTL sebesar 0,908. Untuk R Square (R^2) = 0,824, menunjukkan bahwa sumbangan pengaruh variabel independen yakni DAU terhadap variabel dependen yaitu BTL adalah sebesar 82,4 %. Sisanya 17,6 % dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model ini. Selanjutnya koefisien B terdiri dari harga konstan (harga Y jika X = 0) dan koefisien regresi. Dari tabel ini didapat persamaan regresi $Y = 1,0 \text{ E11} + 0,836 X$, konstanta regresi 1,0 E11 dapat diartikan jika DAU = 0, maka BTL = 1,0 E11. Sementara koefisien regresi 0,836 dapat juga diartikan jika DAU meningkat 1 satuan maka BTL akan meningkat 0,836 satuan.

Signifikansi adalah besarnya probabilitas atau peluang untuk memperoleh kesalahan dalam pengambilan keputusan. Jika tingkat signifikansi 0,05, artinya peluang melakukan kesalahan maksimum 5 % (berarti tingkat kepercayaannya = 95 %). Untuk mengambil keputusan bisa dilakukan dengan cara melihat nilai signifikansi, jika signifikansi < 0,05 maka ada pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Dari hasil output regresi pada Tabel IV.3 di atas, sig (tingkat signifikansi) = 0,000, berarti lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat diartikan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap BTL.

b. Analisis Regresi Linear Sederhana X_2 (PAD) dan Y_2 (BL)

(Persamaan : $Y_2 = a + b \cdot X_2 + c$)

Berdasarkan pengolahan data melalui alat bantu software SPSS dengan input variabel independen (X_2) yaitu Pendapatan Asli Daerah dan variabel dependen (Y_2) yaitu Belanja Langsung, maka didapat hasil/output sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel IV.4 berikut ini:

Tabel IV.4 : Output Regresi Linear PAD dan Belanja Langsung (BL)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.730E11	6.707E10		2.579	.033
	PAD	2.347	.306	.938	7.669	.000

a. Dependent Variable: Belanja Langsung

Nilai R dalam tabel dapat dilihat pada kolom Beta yaitu sebesar 0,938, artinya korelasi antara PAD dan BL sebesar 0,938. Untuk R Square (R^2) = 0,880, menunjukkan bahwa sumbangan pengaruh variabel independen yakni PAD terhadap variabel dependen yaitu BL adalah sebesar 88,0 %. Sisanya 12,0 % dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model ini. Selanjutnya koefisien B terdiri dari harga konstan (harga Y jika X = 0) dan koefisien regresi. Dari tabel ini didapat persamaan regresi $Y = 1,73 \text{ E11} + 2,347 X$, konstanta regresi 1,73 E11 dapat diartikan jika PAD = 0 maka BL = 1,73 E11. Sementara koefisien regresi 2,347 dapat juga diartikan jika PAD meningkat

1 satuan maka BL akan meningkat 2,347 satuan.

Signifikansi adalah besarnya probabilitas atau peluang untuk memperoleh kesalahan dalam pengambilan keputusan. Jika tingkat signifikansi 0,05, artinya peluang melakukan kesalahan maksimum 5 % (berarti tingkat kepercayaannya = 95 %). Untuk mengambil keputusan bisa dilakukan dengan cara melihat nilai signifikansi, jika signifikansi < 0,05 maka ada pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Dari hasil output regresi pada Tabel IV.4, sig (tingkat signifikansi) = 0,000, berarti lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat diartikan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap BL.

c. Analisis Regresi Linear Berganda X_1 (DAU) dan X_2 (PAD) terhadap Y (BD);

Persamaan: $Y = a + b_1 \cdot X_1 + b_2 \cdot X_2 + \epsilon$
 Berdasarkan pengolahan data melalui alat bantu software SPSS dengan input variabel independen 1 (X_1) yaitu Dana Alokasi Umum dan variabel independen 2 (X_2) yaitu Pendapatan Asli Daerah dan variabel dependen (Y) yaitu Belanja Daerah, maka didapat hasil/output sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel IV.5 s.d Tabel IV.8 berikut:

Tabel IV.5 : Output Coefficients Regresi Linear Berganda DAU, PAD dan Belanja Daerah

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta				Tolerance	VIF
1	(Constant)	-1,303E11	1,742E11		-.748	.479		
	DAU	1,616	.329	.725	4,913	.002	.190	5,257
	PAD	1,145	.601	.281	1,904	.099	.190	5,257

Dalam output ini menjelaskan tentang hasil uji t, nilai-nilai persamaan regresi yang digunakan dan juga uji multikolinearitas. Unstandardized Coefficients adalah nilai koefisien yang tidak terstandarisasi, menggunakan satuan yang digunakan dalam variabel dependen yakni Rp. Koefisien B terdiri dari harga konstan (harga Y jika X_1 dan $X_2 = 0$) dan koefisien regresi (nilai yang menunjukkan peningkatan atau penurunan variabel Y yang didasari pada variabel X_1 dan X_2).

Dari tabel ini didapat persamaan regresi $Y = -1,303 E11 + 1,616 X_1 + 1,145 X_2$,

konstanta regresi -1,303 E11 dapat diartikan jika DAU = 0 dan PAD = 0 maka BD = -1,303 E11. Sementara koefisien regresi DAU = 1,616 dapat diartikan jika DAU meningkat 1 satuan maka BD akan meningkat 1,616 satuan, kemudian koefisien regresi PAD 1,145 dapat juga diartikan jika PAD meningkat 1 satuan maka BD akan meningkat 1,145 satuan.

Nilai t (t hitung) adalah pengujian signifikansi untuk mengetahui pengaruh variabel independen X_1 dan X_2 terhadap Y secara parsial. Selanjutnya Signifikansi adalah besarnya probabilitas atau peluang untuk memperoleh kesalahan dalam pengambilan keputusan. Jika tingkat signifikansi 0,05, artinya peluang melakukan kesalahan maksimum 5 % (berarti tingkat kepercayaannya = 95 %). Untuk mengambil keputusan bisa dilakukan dengan cara melihat nilai signifikansi, jika signifikansi < 0,05 maka ada pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Dari hasil output sig (tingkat signifikansi) untuk DAU = 0,002, berarti lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat diartikan bahwa DAU berpengaruh positif/signifikan terhadap BD. Lalu sig untuk PAD = 0,099 yang berarti lebih besar dari 0,05, sehingga dapat diartikan bahwa PAD tidak berpengaruh positif terhadap BD.

Dalam kolom terakhir terdapat Collinearity Statistic, yaitu nilai yang menunjukkan ada tidaknya hubungan linear secara sempurna / mendekati sempurna antar variabel independen dalam model regresi, hal ini dapat dilihat pada subbab sebelumnya Uji Asumsi Klasik.

Tabel IV.6 : Output ANOVA Regresi Linear Berganda DAU, PAD dan BD

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3,182E24	2	1,591E24	117,238	.000 ^a
	Residual	9,500E22	7	1,357E22		
	Total	3,277E24	9			

a. Predictors: (Constant), PAD, DAU

b. Dependent Variable: Belanja Daerah

Output ANOVA ini menjelaskan tentang hasil uji F (uji koefisien regresi secara bersama-sama) yang digunakan untuk

menguji signifikansi pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk mengambil keputusan bisa dilakukan dengan cara melihat nilai signifikansi (sig), jika $\text{sig} < 0,05$ maka ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dari hasil output sig (tingkat signifikansi) = 0,000, berarti lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat diartikan bahwa DAU dan PAD berpengaruh positif terhadap BD

Tabel IV.7 : Output Model Summary Regresi Linear Berganda DAU, PAD dan BD

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.985 ^a	.971	.963	1.165E11	1.648

a. Predictors: (Constant), PAD, DAU
b. Dependent Variable: Belanja Daerah

Selanjutnya output di atas ini menjelaskan tentang hasil analisis korelasi ganda, analisis determinasi dan uji autokorelasi dengan Durbin Watson. R dalam regresi linear berganda ini adalah menunjukkan korelasi antara dua variabel independen atau lebih (X_1 dan X_2) terhadap variabel dependen (Y). Nilai R berkisar antara 0 sampai dengan 1, jika R mendekati 1 maka hubungan semakin erat, tetapi jika mendekati 0 maka hubungan semakin lemah. Nilai R dalam tabel didapat sebesar 0,985, artinya korelasi antara DAU dan PAD terhadap BD sebesar 0,985, hal ini berarti menunjukkan hubungan yang sangat erat.

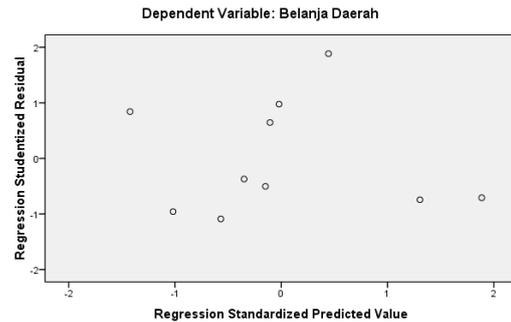
Persamaan garis regresi linear berganda yang akan digunakan untuk memperkirakan/meramalkan, biasanya disertai dengan nilai $R^2 =$ koefisien determinasi berganda. Untuk R Square (R^2) = 0,971, menunjukkan bahwa sumbangan pengaruh variabel independen DAU dan PAD terhadap variabel dependen BD adalah sebesar 97,1 %. Sisanya 2,9 % dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model ini.

Pada kolom terakhir terdapat nilai Durbin-Watson, yaitu menunjukkan ada tidaknya autokorelasi dalam model regresi, hal ini dapat dilihat pada subbab sebelumnya yaitu tentang Uji Asumsi Klasik.

Tabel IV.8 : Output Residuals Statistics Regresi Linear Berganda DAU, PAD & BD

Residuals Statistics ^a					
	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	4.71E11	2.44E12	1.32E12	5.946E11	10
Std. Predicted Value	-1.423	1.886	.000	1.000	10
Standard Error of Predicted Value	4.161E10	9.942E10	6.121E10	1.899E10	10
Adjusted Predicted Value	3.34E11	2.51E12	1.32E12	6.308E11	10
Residual	-1.167E11	2.051E11	.000	1.027E11	10
Std. Residual	-1.002	1.761	.000	.882	10
Stud. Residual	-1.089	1.885	-.003	1.010	10
Deleted Residual	-1.380E11	2.351E11	1.716E9	1.425E11	10
Stud. Deleted Residual	-1.107	2.487	.062	1.135	10
Mahal. Distance	.248	5.655	1.800	1.764	10
Cook's Distance	.010	.634	.143	.183	10
Centered Leverage Value	.028	.628	.200	.196	10

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

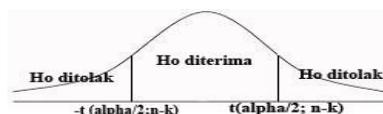


Output terakhir Charts, digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas, yaitu varian residual yang tidak sama pada pengamatan dalam model regresi. Hal ini juga dapat dilihat pada subbab sebelumnya tentang Uji Asumsi Klasik.

3. Uji Hipotesis

a. Uji t

Dari analisis regresi linear sederhana dan berganda pada poin 4a - 4c di atas, maka dari ke 3 hasil output regresi tersebut, pengujian hipotesisnya (uji t) dibuat dalam bentuk tabel (Tabel IV.9a).



Tabel IV.9a : Resume Persamaan Regresi Linear Sederhana & Hasil Perhitungan Uji Statistik t

Uraian/Pers. Regresi	Hipotesis
DAU terhadap BTL $Y = 1,0 E11 + 0,836 X$	Ho: DAU tdk berpengaruh thd BTL Ha: DAU berpengaruh thd BTL
PAD terhadap BL $Y = 1,73 E11 + 2,347 X$	Ho: PAD tdk berpengaruh thd BL Ha: PAD berpengaruh thd BL
DAU terhadap BD $Y = -1,3E11 + 1,616X_1 + 1,145X_2$	Ho: DAU tdk berpengaruh thd BD Ha: DAU berpengaruh thd BD
PAD terhadap BD $Y = -1,3E11 + 1,616X_1 + 1,145X_2$	Ho: PAD tdk berpengaruh thd BD Ha: PAD berpengaruh thd BD

Kriteria pengujian :

Jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka H_0 diterima

Jika $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau

$t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak

t_{hitung}	t_{tabel}	Pengujian	Kesimpulan
6,123	2,306	$t_{hitung} > t_{tabel}$	Ho ditolak
7,669	2,306	$t_{hitung} > t_{tabel}$	Ho ditolak
4,913	2,365	$t_{hitung} > t_{tabel}$	Ho ditolak
1,904	2,365	$t_{hitung} \leq t_{tabel}$	Ho diterima

b. Uji F

Dari analisis regresi linear berganda poin 4c di atas, maka dari hasil output regresi tersebut, pengujian hipotesisnya (uji F) dibuat dalam bentuk tabel sebagaimana diperlihatkan dalam Tabel IV.9b.



Kriteria pengujian :
 Jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ maka H_0 diterima
 Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak

Tabel IV.9b : Persamaan Regresi Linear Berganda & Hasil Perhitungan Uji Statistik F

Uraian/Pers. Regresi	Hipotesis	F_{hitung}	F_{tabel}	Pengujian	Kesimpulan
DAU dan PAD terhadap BD	H_0 : DAU & PAD tdk berpengaruh terhadap BD	117,238	4,737	$F_{hitung} > F_{tabel}$	Ho ditolak
$Y = -1,303 E11 + 1,616 X_1 + 1,145 X_2$	H_a : DAU & PAD berpengaruh terhadap BD				

4. Pengujian Perbandingan 2 Rata-rata

Dari output analisis uji t sampel berpasangan (Paired Samples T Test) dengan 3 data berpasangan yaitu Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung dan Belanja Daerah (Lampiran 1) sebelum dan setelah diberlakukannya UU No 28 Tahun 2009 yaitu pada tahun 2010 dan 2011, didapat hasil/output sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel IV.10 - 12 berikut ini :

Tabel IV.10 : Output Pengujian Perbandingan 2 Rata-rata Belanja Tdk Langsung Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2010 dan 2011

Paired Samples Test						
Pair 1	Sebelum - Setelah	Paired Differences			95% Confidence Interval of the Difference	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	Lower	Upper
		-3.803E9	1.388E10	2.391E9	-8.647E9	1.040E9

t-Test					
95% Confidence Interval of the Difference					
Lower	Upper	t	df	Sig. (2-tailed)	
-8.647E9	1.040E9	-1.998	33	.120	

Pada output Tabel IV 10, menjelaskan tentang hasil uji sampel

berpasangan (Paired Samples T Test). Dalam tabel Paired Samples T Test kolom Sig (2-tailed), terbaca 0,120. Dari angka 0,120; dapat diartikan bahwa pada BTL tidak terdapat perbedaan signifikan (karena $0,120 > 0,05$) antara sebelum dan sesudah diberlakukannya UU No 28 Tahun 2009.

Tabel IV.11 : Output Pengujian Perbandingan 2 Rata-rata Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2010 dan 2011

Paired Samples Test						
Pair 1	Sebelum - Setelah	Paired Differences			95% Confidence Interval of the Difference	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	Lower	Upper
		-7.273E9	1.816E10	3.115E9	-1.361E10	-8.360E8

t-Test					
95% Confidence Interval of the Difference					
Lower	Upper	t	df	Sig. (2-tailed)	
-1.361E10	-8.360E8	-2.335	33	.026	

Pada output Tabel IV 11, menjelaskan tentang hasil uji sampel berpasangan (Paired Samples T Test). Dalam tabel Paired Samples T Test kolom Sig (2-tailed), terbaca untuk Belanja Langsung adalah : 0,026. Dari angka-angka 0,026 tersebut dapat diartikan bahwa pada BL terdapat perbedaan signifikan (karena $0,026 < 0,05$) antara sebelum dan sesudah diberlakukannya UU No 28 Tahun 2009.

Tabel IV.12 : Output Pengujian Perbandingan 2 Rata-rata Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2010 dan 2011

Paired Samples Test						
Pair 1	Sebelum - Setelah	Paired Differences			95% Confidence Interval of the Difference	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	Lower	Upper
		-1.10E10	3.064E10	5.256E9	-2.177E10	-3.845E8

t-Test					
95% Confidence Interval of the Difference					
Lower	Upper	t	df	Sig. (2-tailed)	
-2.177E10	-3.845E8	-2.108	33	.043	

Pada output Tabel IV 12, menjelaskan tentang hasil uji sampel berpasangan (Paired Samples T Test). Dalam tabel Paired Samples T Test kolom Sig (2-tailed), terbaca untuk Belanja Daerah (BD) adalah : 0,043. Dari angka 0,043 tersebut dapat diartikan bahwa pada BD terdapat

perbedaan signifikan (karena $0,043 < 0,05$) antara sebelum dan sesudah diberlakukannya UU No 28 Tahun 2009.

5. Koefisien Determinasi

Dari output analisis regresi linear sederhana maupun berganda pada Tabel IV.3, IV.4 dan IV.7 sebelumnya, pada kolom Beta ataupun R bisa didapat nilai R^2 dan R^2_{y12} yaitu nilai yang menunjukkan koefisien determinasi. Ketiga nilai koefisien determinasi (R^2 dan R^2_{y12}) tersebut dirangkum dalam Tabel IV.13 berikut ini :

Tabel IV.13 : Nilai Koefisien Determinasi (R^2 / R^2_{y12})

Uraian	Persamaan Regresi	R	R^2 / R^2_{y12}
DAU terhadap BTL	$Y_1 = 1,0 \text{ E11} + 0,836 X_1 + \epsilon$	0,908	0,824
PAD terhadap BL	$Y_2 = 1,73 \text{ E11} + 2,347 X_2 + \epsilon$	0,938	0,880
DAU & PAD thd BD	$Y = -1,303 \text{ E11} + 1,616 X_1 + 1,145 X_2$	0,985	0,971

Terlihat pada tabel di atas nilai R^2 / R^2_{y12} yang hampir mendekati 1, yang berarti pendekatannya cocok digunakan dalam hubungan linear antar variable, khususnya pengaruh DAU & PAD terhadap BD dan pengaruh DAU terhadap BD.

B. Pembahasan

1. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Tidak Langsung (BTL).

Dari hasil output regresi telah diketahui bahwa DAU berpengaruh positif/signifikan terhadap BTL. Ini berarti sejalan dengan teori bahwa DAU merupakan komponen utama / sumbangan yang terbesar bagi Belanja Daerah khususnya Belanja Tidak Langsung.

Sumbangan pengaruh DAU terhadap BTL pada kabupaten Deli Serdang adalah sebesar 82,4%. Dibandingkan dengan rata-rata dana perimbangan untuk kabupaten/kota diseluruh Indonesia (data BPS 2005 dan 2006) yaitu sebesar 79,9%, kabupaten Deli Serdang masih lebih besar dalam penerimaan dana perimbangan. Ini menunjukkan perlunya kabupaten Deli Serdang lebih meningkatkan kemandirian daerahnya, sehingga porsi DAU yang merupakan komponen dari

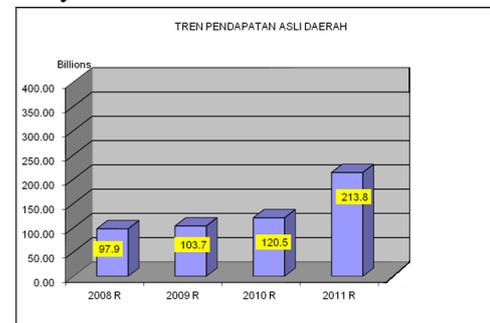
Gaji PNS Daerah ditambah Celah Fiskal dapat dioptimalkan lagi sehingga bisa di bawah rata-rata nasional. Dengan demikian berarti pemerintah daerah harus meningkatkan kapasitas fiskalnya, seperti pajak daerah, retribusi daerah dan lainnya.

2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Langsung (BL).

Dari hasil output regresi diketahui bahwa PAD berpengaruh positif terhadap BL dengan sumbangan pengaruh PAD terhadap BL adalah sebesar 88,0 %. Ini menunjukkan bahwa sudah tercerminnya semangat UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah mengalihkan sebagian pajak pusat menjadi pajak daerah, diantaranya yaitu PBB P2 dan BPHTB.

Jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah yang ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan dengan Pendapatan Daerah pada tahun 2009 dan 2010 adalah 8,30 % dan 9,22 %. Dari rasio ini terlihat ketergantungan daerah pada pemerintah pusat masih tinggi (skala 0 – 25 %).

Disamping itu juga, pendekatan anggaran kinerja (PP 59/2005 pasal 39) sudah terlihat, yaitu PAD yang sebagian besar digunakan untuk Belanja Langsung, berarti mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang artinya memaksimumkan anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat daerah.



Gambar IV.1 : Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kab Deli Serdang tahun 2008 - 2011

Sumber : Laporan Keuangan Pemkab Deli Serdang

Dari grafik data PAD empat tahun terakhir di atas terlihat bahwa pada tahun 2008 ke tahun 2010, PAD terlihat relatif meningkat stabil, tetapi pada tahun 2010 ke tahun 2011 (setelah diberlakukannya UU No 28 Tahun 2009), PAD melonjak cukup signifikan/drastis (77,37 %).

3. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah (BD).

Dari hasil output regresi telah diketahui secara parsial (uji t) bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah (BD). Ini menunjukkan bahwa DAU merupakan komponen utama/sumbangan yang terbesar bagi Belanja Daerah.

Dalam 3 tahun terakhir data realisasi APBD Kabupaten Deli Serdang, Belanja Daerah terus mengalami peningkatan, berturut-turut mulai tahun 2009 s.d 2011 adalah: Rp 1.253.435.936.858,64, Rp 1.333.248.401.822,39 dan Rp 1.654.873.747.938,42. Demikian pula trend pendapatan daerah meningkat dari tahun 2009 s.d 2011 yaitu : 1.249.163.262.641,19, Rp 1.307.283.023.524,36 dan Rp 1.624.362.776.533,53 sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Gambar IV.2 : Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2008 – 2011
Sumber : Laporan Keuangan Pemkab Deli Serdang

Dari data kenaikan yang sama signifikannya antara Belanja Daerah dengan Pendapatan Daerah, menunjukkan pula berbanding lurusnya antara Belanja Daerah dengan Dana Alokasi Umum (DAU), karena DAU ini merupakan komponen terbesar pada Pendapatan Daerah.

4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (BD).

Dari hasil output regresi telah diketahui secara parsial (uji t) PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah (BD). Ini menunjukkan pula bahwa tanpa DAU yang merupakan komponen utama/sumbangan yang terbesar bagi Belanja Daerah, PAD yang dalam gambar IV.1 terlihat mengalami peningkatan yang cukup drastis tetapi dalam pengujiannya (selama kurun waktu 10 tahun) ia belum mampu secara signifikan berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

Walaupun dalam penelitian lain seperti Nur Indah Rahmawati (2010) meneliti Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Alokasi Belanja Daerah (Studi Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). Pada hasil penelitian, hipotesisnya menyatakan bahwa: PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Langsung. Hasil pengujian statistik menunjukkan tingkat signifikan Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,000 yang lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05 sehingga dapat membuktikan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja langsung.

5. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (BD).

Secara bersama-sama, hasil output regresi (uji F) menunjukkan bahwa DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap BD. Sumbangan pengaruh DAU dan PAD terhadap BD pada kabupaten Deli Serdang adalah sebesar 97,1%, sisanya 2,9 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini seperti Dana Bagi Hasil, DAK, transfer Pemerintah Provinsi dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Pada pembahasan sebelumnya, jika secara parsial/sendiri-sendiri PAD belum berpengaruh positif terhadap BD. Ini sebenarnya secara umum sudah

terlihat pada Tabel IV.1b Data dari variabel Independen (DAU dan PAD) dan Dependen (BD), perbandingan yang cukup jauh antara DAU dan PAD. Dibandingkan rata-rata secara nasional, berdasarkan data dari BPS pada tahun 2004, kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah adalah hanya sebesar 8,10 %.

Dalam manajemen belanja daerah, terdapat hal yang penting untuk diperhatikan yaitu perkiraan target pendapatan untuk pengalokasiannya dan pengelolaan untuk pembelanjannya. Sesuai teori sebelumnya pada fungsi anggaran sektor publik yaitu anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal, maka terlihat disini pada DAU yang sudah berperan sebagai sumbangan utama dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sementara dari sisi karakteristik anggaran sektor publik bahwa komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan harus dijaga, yaitu menjaga kebutuhan fiskal agar pelayanan kepada rakyat bisa terlaksana dengan baik.

Terakhir ditinjau dari prinsip anggaran sektor publik tentang keutuhan anggaran bahwa semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum dan jumlah yang telah disetujui oleh legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien dan ekonomis, juga sudah terlihat baik, diantaranya diindikasikan dari sumbangan pengaruh DAU dan PAD yang sangat tinggi/signifikan yaitu sebesar 97,1 %

6. Perbandingan 2 Rata-rata Belanja Tidak Langsung (BTL), Belanja Langsung (BL) dan Belanja Daerah (BD).

Dari hasil analisis uji t sampel berpasangan sebelumnya diketahui bahwa hanya Belanja Tidak Langsung (BTL) saja yang tidak terdapat perbedaan signifikan antara sebelum dan sesudah diberlakukannya UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tahun 2010 dan

tahun 2011. Nilai t_{hitung} didapat = -1,598, sedangkan nilai t_{tabel} = 2,035 (dengan $df = n - 1 = 33$), maka $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ sehingga H_0 diterima.

Sedangkan untuk Belanja Langsung (BL) dan Belanja Daerah (BD) terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah diberlakukannya UU tersebut. Ini menunjukkan bahwa pemberlakuan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) hanya mempengaruhi secara signifikan pada BL dan BD tetapi tidak mempengaruhi secara signifikan pada Belanja Tidak Langsung karena Pajak Daerah dan Retribusi daerah lebih diperuntukkan kepada Belanja Langsung.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hipotesa yang telah diuji, hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Tidak Langsung (BTL).
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung (BL).
3. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah (BD).
4. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Daerah (BD).
5. Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah (BD).

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perijinan Terpadu Kabupaten Bogor, *Buku Panduan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu*, BPT, Bogor.
- Ediwarman, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum Panduan*

- Penulisan Tesis dan Disertasi*, Medan.
- Halim, Abdul, 2012, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu S P, 2005, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Kementrian Keuangan RI, “*Potret APBD TA 2013*”, <http://djpk.kemenkeu.go.id> (internet)
- Mahmudi, 2010, *Manajemen Keuangan Daerah*, Erlangga, Jakarta.
- Nurul, Arifa Ade, “*Struktur APBD dan Kode Rekening*”, <http://scribd.com> (internet)
- Panggabean, Henri Edison H, 2009, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Toba Samosir*, USU Repository, Medan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan No 165 Tahun 2012 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah.
- Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Priantara, Diaz, 2012, *Perpajakan Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Rahmawati, Nur Indah, 2010, *Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Alokasi Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)*, Semarang.
- Robins, Stephen P, 2008, *Perilaku Organisasi*, Salemba Empat, Jakarta.
- Salvatore, Dominick, 2005, *Managerial Economics*, Salemba Empat, Jakarta.
- Situmorang, Syafrizal Helmi, 2011, *Bisnis Konsep dan Kasus*, USU Press, Medan.
- Sunyoto, Danang, 2011, *Analisis Regresi dan Uji Hipotesis*, Caps, Yogyakarta.
- Supranto, Johanes, 2009, *Statistik Teori dan Aplikasi*, Erlangga, Jakarta.
- Suwanda, Dadang, 2013, *Strategi Mendapatkan Opini WTP Laporan Keuangan Pemda*, PPM Manajemen, Jakarta.
- Tanjung, Bahdin Nur, 2005, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Undang-Undang No 20 Tahun 2000 Perubahan atas Undang-Undang No 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Widarjono, Agus, 2010, *Analisis Statistika Multivariat Terapan*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.